

ANALISIS TIPOLOGI DAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI ANTAR WILAYAH DI PROVINSI PAPUA BARAT

Arqilaus A. V. Homer¹

Charley M. Bisai²
charleybisai@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the regional typology and measure the level of economic development inequality among districts and cities in West Papua Province. The research period covers 2017 to 2021 for inequality analysis and 2018 to 2021 for typology analysis. The analytical methods used are the Williamson Index to measure the level of development inequality, and the Klassen Typology to classify regions based on patterns and structures of economic growth. Both methods were applied to two scenarios, namely GRDP with the oil and gas sector and GRDP without the oil and gas sector, in order to examine the differential impact of the oil and gas sector on inequality and regional classification. The results show that the level of inequality in West Papua Province is classified as severe for GRDP including oil and gas, with an average Williamson Index of 1.51428, while for GRDP excluding oil and gas, the inequality is classified as moderate, with an average of 0.4327. This inequality is caused by the concentration of economic activities in certain regions such as Teluk Bintuni Regency, Sorong Regency, and Sorong City, as well as differences in natural resources and infrastructure among regions. Based on the Klassen Typology analysis for GRDP including oil and gas, no region falls into quadrant I (advanced and fast-growing regions). Sorong Selatan, Maybrat, and Pegunungan Arfak Regencies are in quadrant II (advanced but depressed regions), Teluk Bintuni and Sorong Regencies are in quadrant III (fast-growing but not advanced regions), and seven other regions are in quadrant IV (relatively lagging regions). Meanwhile, for GRDP excluding oil and gas, Teluk Bintuni and Raja Ampat Regencies fall into quadrant I, seven regions are in quadrant III, and four regions are in quadrant IV. The discussion confirms that the oil and gas sector has a dominant influence on the regional economy, so that good management of this sector can reduce inequality, whereas poor management will widen the gap. This study recommends policy prioritization for lagging regions such as Pegunungan Arfak, Tambrau, and Maybrat, as well as more equitable distribution of economic concentration and infrastructure development throughout West Papua Province.

Keywords: Klassen Typology, Williamson Index, development inequality, West Papua, oil and gas

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya bukan sekadar upaya peningkatan produksi barang dan jasa, melainkan sebuah proses multidimensional yang mencakup perubahan besar dalam struktur ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Todaro pada tahun 2012, pembangunan yang ideal harus melibatkan percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan, serta pemberantasan kemiskinan secara simultan. Di Indonesia, landasan yuridis pembangunan nasional termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menekankan bahwa pembangunan harus diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan tetap menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Namun, dalam praktiknya, pencapaian tujuan tersebut menghadapi tantangan serius akibat adanya perbedaan karakteristik antar wilayah di Indonesia.

Perbedaan karakteristik wilayah merupakan konsekuensi logis yang tidak dapat dihindari dalam konteks negara kepulauan seperti Indonesia. Setiap wilayah memiliki kondisi geografis, potensi sumber

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

² Staf Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

daya alam, kualitas sumber daya manusia, tingkat investasi, serta infrastruktur yang berbeda-beda. Perbedaan ini berpengaruh kuat terhadap terciptanya pola pembangunan ekonomi, sehingga suatu keniscayaan bahwa pola pembangunan ekonomi di Indonesia tidak seragam. Ketidakterseragaman ini berdampak pada kemampuan setiap wilayah untuk tumbuh. Beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat karena didukung oleh faktor-faktor produksi yang melimpah dan akses yang memadai, sementara wilayah lainnya tumbuh lambat akibat keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang kurang memadai. Kemampuan tumbuh yang berbeda ini pada akhirnya menyebabkan terjadinya ketimpangan, baik dalam proses pembangunan maupun dalam hasil pembangunan, yang paling nyata tercermin dari kesenjangan pendapatan antar daerah.

Para ekonom seperti Tambunan (2011) mengidentifikasi sejumlah faktor penyebab disparitas antar daerah di Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi investasi yang tidak merata, tingkat mobilitas faktor produksi antar daerah yang rendah, perbedaan sumber daya alam, perbedaan kondisi geografis antar wilayah, serta kurang lancarnya perdagangan antar provinsi karena infrastruktur yang belum memadai. Arsyad (2010) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang, disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat tercermin dari adanya kenaikan pendapatan per kapita masyarakat. Tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah, dan antar sektor.

Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB, namun indikator ini tidak selalu tepat karena tidak sepenuhnya menggambarkan pertumbuhan yang sebenarnya dalam arti kesejahteraan masyarakat. Indikator lain yang lebih komprehensif adalah PDRB per kapita, karena indikator ini lebih menekankan pada kemampuan daerah untuk meningkatkan PDRB melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara teoretis dapat menggambarkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui hasil peningkatan produksi yang menyebabkan konsumsi masyarakat juga meningkat, yang pada gilirannya menandakan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, realitas yang sering terjadi adalah peningkatan hasil produksi ini hanya dinikmati oleh segelintir golongan minoritas, sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan. Kesenjangan pendapatan antar daerah merupakan topik yang perlu dikaji secara mendalam karena kesenjangan merupakan suatu hal yang dapat menghambat pembangunan daerah serta pembangunan nasional secara keseluruhan. Adanya kesenjangan pembangunan antar daerah dapat ditunjukkan dengan belum meratanya persebaran penduduk dan ketenagakerjaan, kesenjangan tingkat kehidupan masyarakat, disparitas pertumbuhan ekonomi antar daerah, dan disparitas pembangunan antar daerah.

Menurut teori pertumbuhan neoklasik yang dikembangkan oleh Solow dan Swan, pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi. Dalam jangka panjang, teori ini memprediksi terjadinya konvergensi, yaitu daerah miskin akan tumbuh lebih cepat daripada daerah kaya sehingga kesenjangan secara bertahap akan berkurang. Namun, dalam kenyataannya, proses konvergensi tersebut tidak selalu terjadi karena adanya berbagai hambatan struktural dan kebijakan yang kurang mendukung pemerataan. Tarigan (2005) mengemukakan bahwa pengembangan perekonomian, baik nasional maupun regional, sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang mengambil peran dalam gerak perekonomian. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia suatu daerah, maka pertumbuhan ekonomi di daerah bersangkutan juga akan semakin meningkat. Namun, pertumbuhan ini seringkali tidak memberikan efek stimulus bagi daerah lain yang lebih tertinggal, khususnya di daerah pedesaan, sehingga justru meningkatkan ketimpangan wilayah.

Teori sumber daya manusia menekankan bahwa peningkatan mutu pendidikan, derajat kesehatan, dan perbaikan gizi merupakan langkah fundamental untuk menumbuhkan inisiatif dan prakarsa masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, produktivitas nasional dan regional dapat ditingkatkan. Penelitian yang dilakukan oleh Prahara (2010), menunjukkan bahwa sumber daya yang dicerminkan pada kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia berhubungan langsung dengan proses produksi, di mana tenaga kerja dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja merupakan modal utama bagi suatu daerah untuk berproduksi.

Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam diperlukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Masalah distribusi pendapatan merupakan masalah yang berbeda dari masalah pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita. Dalam kondisi distribusi pendapatan yang sempurna atau absolute equality, setiap orang akan menerima pendapatan yang sama besarnya. Namun, pada kenyataannya, pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk belum mencerminkan angka pendapatan per kapita yang ada selama ini. Seberapa besar pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sangat berkaitan dengan masalah merata atau tidak meratanya distribusi pendapatan tersebut. Oleh karena itu, pemerataan pendapatan adalah masalah yang penting dalam pembangunan, sebagaimana ditegaskan oleh Emalia pada tahun 2009.

Salah satu tujuan utama pemerintah daerah Provinsi Papua Barat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, masih banyak masalah yang dihadapi, salah satunya adalah disparitas pembangunan yang tergambar pada PDRB per kapita Provinsi Papua Barat. Data yang disajikan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pada periode 2015 hingga 2019, persentase penduduk miskin di Provinsi Papua Barat masih sangat tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Pada tahun 2015, angka kemiskinan Papua Barat mencapai 25,73 persen sementara nasional hanya 11,13 persen. Meskipun mengalami penurunan bertahap hingga mencapai 21,51 persen pada tahun 2019, angka ini masih jauh di atas angka nasional yang hanya 9,22 persen pada tahun yang sama. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hasil-hasil pembangunan belum sepenuhnya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di Papua Barat.

Perbedaan pendapatan per kapita yang tajam antar kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat menjadi indikasi terjadinya ketimpangan akibat konsentrasi aktivitas perekonomian yang bersifat sentral. Kabupaten Teluk Bintuni yang kaya akan sumber daya migas memiliki PDRB per kapita jauh di atas rata-rata provinsi, sementara kabupaten seperti Pegunungan Arfak dan Tambrauw memiliki PDRB per kapita yang sangat rendah. Meskipun demikian, konsentrasi aktivitas ekonomi pada wilayah tertentu tidak dapat dihindari dan bahkan cenderung dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi karena merupakan salah satu bagian dari proses pembangunan. Ketimpangan wilayah merupakan konsekuensi yang wajar asalkan masih dalam batas yang layak. Namun, fenomena ketimpangan yang terlalu lebar akan melahirkan daerah-daerah yang cenderung tertinggal dan sulit untuk mengejar ketertinggalannya. Dalam teori konvergensi, dikenal istilah *catching up effect*, yaitu daerah dengan perekonomian miskin akan mampu mengejar daerah dengan perekonomian kaya. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa daerah kaya akan mengalami kondisi *steady-state*, yaitu kondisi di mana daerah tidak dapat meningkatkan tingkat pendapatannya karena tambahan investasi tidak lagi menambah pendapatan. Sementara daerah kaya stagnan, daerah miskin terus mengejar dan akhirnya pada suatu saat akan menyamakan pendapatan daerah kaya sehingga terjadi *catching up effect*. Namun, asumsi ini hanya akan terwujud jika terdapat mobilitas faktor produksi yang lancar, difusi teknologi yang merata, serta kebijakan pemerintah yang berpihak pada daerah tertinggal.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah diuraikan secara panjang lebar tersebut, yaitu tingginya angka kemiskinan, melebarnya kesenjangan pendapatan antar kabupaten dan kota, perbedaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada daerah tertinggal, maka penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana tipologi wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat berdasarkan pola dan struktur pertumbuhan ekonomi. Kedua, apakah terdapat ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah di Provinsi Papua Barat. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tipologi wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat, serta untuk mengetahui dan menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah di Provinsi Papua Barat.

Penelitian ini menarik dan penting dilakukan karena beberapa hal. Pertama, meskipun ketimpangan antar wilayah di Provinsi Papua Barat tergolong berat, namun kajian mengenai hal ini masih sangat terbatas. Kedua, penelitian ini unik karena membandingkan ketimpangan dengan dan tanpa sektor migas, mengingat sektor tersebut mendominasi ekonomi di beberapa daerah tetapi tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat. Ketiga, status otonomi khusus Papua Barat menuntut kebijakan berbasis data empiris yang akurat, sehingga penelitian ini dapat menjadi masukan konkret bagi pemerintah daerah. Keempat, penggunaan dua alat analisis sekaligus, yaitu Tipologi Klassen dan Indeks

Williamson, memberikan gambaran ketimpangan yang lebih holistik dibanding penelitian sebelumnya. Kelima, hasil penelitian ini berkontribusi langsung dalam perencanaan pembangunan, khususnya dalam mengalokasikan investasi dan infrastruktur secara tepat sasaran ke daerah tertinggal seperti Pegunungan Arfak, Tamberauw, dan Maybrat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bernilai akademis, tetapi juga relevan secara kebijakan untuk pemerataan pembangunan di Papua Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Papua Barat dengan objek pada Badan Pusat Statistik, instansi Penanaman Modal, dan BPKAD, selama tiga bulan dari November 2021 hingga Februari 2022. Periode data yang digunakan adalah tahun 2017 hingga 2021. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder kuantitatif berupa time series, meliputi data jumlah penduduk, PDRB tahunan atas dasar harga konstan 2010, data dana bantuan, data pengeluaran pembangunan, dan data investasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dari buku, jurnal, dan artikel, serta studi dokumentasi dari instansi terkait. Adapun metode analisis yang digunakan terdiri dari dua alat. Pertama, Indeks Williamson untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah, dengan rumus yang membandingkan PDRB per kapita dan jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota terhadap rata-rata provinsi. Nilai indeks berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 0 berarti semakin merata, dan semakin mendekati 1 berarti ketimpangan berat. Kedua, Tipologi Klassen untuk mengklasifikasikan wilayah berdasarkan dua indikator utama, yaitu laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita. Klasifikasi ini membagi daerah menjadi empat kuadran: daerah cepat maju dan cepat tumbuh, daerah maju tapi tertekan, daerah berkembang cepat, dan daerah relatif tertinggal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan dua pendekatan utama, yaitu Indeks Williamson untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah, dan Tipologi Klassen untuk mengklasifikasikan pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat. Periode analisis yang digunakan adalah tahun 2017 hingga 2021 untuk Indeks Williamson, dan tahun 2018 hingga 2021 untuk Tipologi Klassen, dengan membedakan perhitungan antara PDRB yang mencakup sektor migas dan PDRB yang tidak mencakup sektor migas.

1. Tingkat Ketimpangan Pembangunan Menurut Indeks Williamson

Berdasarkan perhitungan Indeks Williamson, tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Papua Barat menunjukkan angka yang sangat tinggi. Untuk PDRB dengan migas, nilai Indeks Williamson selama tahun 2017 hingga 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1 Indeks Williamson Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2021

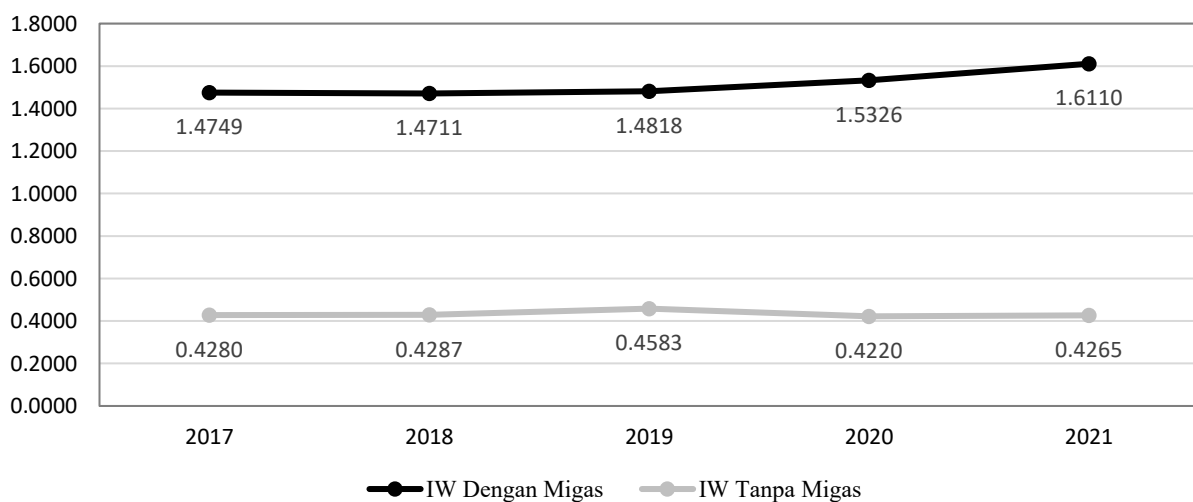
Tahun	IW Dengan Migas	Keterangan	IW Tanpa Migas	Keterangan
2017	1.4749	Berat	0.4280	Sedang
2018	1.4711	Berat	0.4287	Sedang
2019	1.4818	Berat	0.4583	Sedang
2020	1.5326	Berat	0.4220	Sedang
2021	1.6110	Berat	0.4265	Sedang
Rata-Rata	1.51428	Berat	0.4327	Sedang

Sumber: data diolah (2023)

Secara berturut-turut, nilai Indeks Williamson dengan migas adalah 1,4749 pada tahun 2017, kemudian sedikit turun menjadi 1,4711 pada tahun 2018, lalu naik menjadi 1,4818 pada tahun 2019, meningkat lagi menjadi 1,5326 pada tahun 2020, dan mencapai puncaknya sebesar 1,6110 pada tahun

2021. Rata-rata indeks dengan migas selama lima tahun tersebut adalah 1,51428, yang tergolong dalam kategori ketimpangan berat karena jauh di atas angka 0,5. Sementara itu, untuk PDRB tanpa migas, nilai Indeks Williamson menunjukkan tingkat ketimpangan yang lebih rendah namun masih termasuk dalam kategori sedang. Nilainya berturut-turut adalah 0,4280 pada tahun 2017, 0,4287 pada tahun 2018, 0,4583 pada tahun 2019, 0,4220 pada tahun 2020, dan 0,4265 pada tahun 2021, dengan rata-rata sebesar 0,4327. Ketimpangan ini terjadi karena masing-masing kabupaten dan kota memiliki sumber daya alam dan infrastruktur yang berbeda-beda. Kabupaten Teluk Bintuni, misalnya, memiliki sejumlah perusahaan besar nasional yang beroperasi di sektor migas sehingga menghasilkan pendapatan yang sangat besar, sementara Kota Sorong memiliki fasilitas pelabuhan antar pulau dan bandara internasional yang menjadikannya pusat perdagangan. Di sisi lain, Kabupaten Pegunungan Arfak memiliki PDRB per kapita terendah dengan sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomiannya.

Gambar 1 Perbandingan Indeks Williamson Provinsi Papua Barat PDRB Dengan Migas dan Tanpa Migas Tahun 2017-2021



Sumber: data diolah (2023)

Jika diamati dari grafik perbandingan tersebut, disparitas antara indeks Williamson dengan migas dan tanpa migas semakin mengecil dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan bahwa penciptaan ekonomi riil di Provinsi Papua Barat semakin meningkat dan mampu bersaing dengan ekonomi migas. Ini merupakan pertanda baik karena kinerja ekonomi riil lebih dirasakan langsung oleh masyarakat. Permasalahan yang masih menjadi tugas pemerintah adalah menekan ketimpangan pembangunan sehingga pembangunan riil ini lebih bisa dinikmati oleh semua wilayah di Provinsi Papua Barat.

2. Tipologi Klassen

Analisis Tipologi Klassen dilakukan dengan pendekatan wilayah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi (r_i) dan pendapatan atau PDRB per kapita (y_i) masing-masing kabupaten/kota, yang dibandingkan dengan rata-rata provinsi (r untuk laju pertumbuhan dan y untuk PDRB per kapita). Klasifikasi yang dihasilkan terdiri dari empat kuadran: Kuadran I (daerah cepat maju dan cepat tumbuh) untuk daerah dengan $y_i > y$ dan $r_i > r$; Kuadran II (daerah maju tapi tertekan) untuk daerah dengan $y_i > y$ tetapi $r_i < r$; Kuadran III (daerah berkembang cepat) untuk daerah dengan $y_i < y$ tetapi $r_i > r$; dan Kuadran IV (daerah relatif tertinggal) untuk daerah dengan $y_i < y$ dan $r_i < r$.

Tabel 2 Tipologi Klassen Dengan Migas Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2018-2021

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
Fakfak	II	II	IV	IV	IV
Kaimana	IV	IV	IV	IV	IV

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
Teluk Wondama	IV	IV	IV	IV	IV
Teluk Bintuni	III	III	I	III	III
Manokwari	IV	IV	IV	II	IV
Sorong Selatan	II	II	IV	II	II
Sorong	III	III	III	III	III
Raja Ampat	IV	IV	II	II	II
Tambrauw	IV	II	IV	IV	IV
Maybrat	II	II	II	IV	II
Manokwari Selatan	IV	II	IV	IV	IV
Pegunungan Arfak	II	II	II	II	II
Kota Sorong	II	IV	IV	IV	IV

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, diolah (2023)

Untuk PDRB dengan migas selama periode 2018 hingga 2021, hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada satupun kabupaten atau kota yang termasuk dalam kuadran I berdasarkan rata-rata tahunan. Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Pegunungan Arfak masuk dalam kuadran II (daerah maju tapi tertekan), yang berarti memiliki pendapatan per kapita di atas rata-rata tetapi pertumbuhan ekonominya di bawah rata-rata. Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Sorong berada pada kuadran III (daerah berkembang cepat), yang berarti memiliki pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata tetapi pendapatan per kapita di bawah rata-rata. Sementara itu, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kota Sorong masuk dalam kuadran IV (daerah relatif tertinggal), yang berarti baik pertumbuhan ekonomi maupun pendapatannya berada di bawah rata-rata provinsi.

Tabel 3 Tipologi Klassen Tanpa Migas Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2018-2021

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
Fakfak	I	III	III	III	III
Kaimana	IV	IV	II	III	III
Teluk Wondama	III	III	III	IV	III
Teluk Bintuni	I	I	III	III	I
Manokwari	III	III	III	III	III
Sorong Selatan	II	IV	IV	III	IV
Sorong	I	III	III	III	III
Raja Ampat	I	I	III	III	I
Tambrauw	IV	IV	IV	IV	IV
Maybrat	IV	IV	II	IV	IV
Manokwari Selatan	IV	IV	IV	IV	IV
Pegunungan Arfak	II	IV	II	III	III
Kota Sorong	I	III	III	III	III

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, diolah (2023)

Untuk PDRB tanpa migas, hasil analisis Tipologi Klassen menunjukkan pola yang berbeda. Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Raja Ampat termasuk dalam kuadran I (daerah cepat maju dan cepat tumbuh) berdasarkan rata-rata tahunan, karena memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita di atas rata-rata provinsi. Tidak ada daerah yang masuk dalam kuadran II

berdasarkan rata-rata. Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kota Sorong masuk dalam kuadran III (daerah maju tapi tertekan), dengan pendapatan per kapita di atas rata-rata tetapi pertumbuhan di bawah rata-rata. Sedangkan Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Manokwari Selatan masuk dalam kuadran IV (daerah relatif tertinggal).

B. Pembahasan

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda, yang pada gilirannya membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Menurut hipotesa neoklasik, pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat hingga mencapai titik puncak, setelah itu jika proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan tersebut akan menurun. Pada negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia, umumnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan tersebut menjadi lebih rendah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan di Provinsi Papua Barat tergolong tinggi, terutama jika sektor migas dimasukkan dalam perhitungan. Hal ini disebabkan oleh adanya konsentrasi kegiatan ekonomi sektor basis di daerah tertentu, serta perbedaan sumber daya alam yang dimiliki antar kabupaten dan kota. Kondisi ini berpengaruh terhadap lingkungan dan infrastruktur antar daerah. Infrastruktur di bidang kesehatan dan pendidikan harus menjadi prioritas utama pemerintah Provinsi Papua Barat karena merupakan faktor yang sangat menunjang agar sumber daya manusia terus berkembang dan mampu mengelola sumber daya alam dengan baik demi kemajuan daerah itu sendiri. Perbandingan antara nilai Indeks Williamson dengan migas dan tanpa migas menunjukkan bahwa rata-rata indeks dengan migas sebesar 1,51428 jauh lebih besar dibandingkan dengan tanpa migas yang hanya 0,4327. Hal ini dikarenakan sektor migas menyumbang pendapatan terbesar di wilayah kabupaten dan kota Provinsi Papua Barat. Dengan demikian, jika sektor migas dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah, tingkat ketimpangan pembangunan akan menurun. Sebaliknya, jika sektor migas tidak dikelola dengan baik, maka ketimpangan akan semakin melebar.

Sementara itu, hasil Tipologi Klassen menunjukkan bahwa terdapat perbedaan klasifikasi yang signifikan antara PDRB dengan migas dan tanpa migas. Kabupaten Teluk Bintuni yang kaya akan sumber daya migas berada pada kuadran I (cepat maju dan cepat tumbuh) ketika sektor migas dihilangkan dari perhitungan, namun ketika migas dimasukkan, daerah ini berada pada kuadran III (berkembang cepat). Hal ini mengindikasikan bahwa ketergantungan pada sektor migas justru dapat mengaburkan potensi ekonomi riil suatu daerah. Sebaliknya, Kabupaten Raja Ampat yang mengandalkan sektor pariwisata dan kelautan menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam PDRB tanpa migas. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pembangunan ekonomi riil yang berbasis pada potensi lokal lebih berkelanjutan dan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat untuk masing-masing kabupaten dan kota, dengan mengarahkan pengembangan infrastruktur kepada daerah-daerah yang selama ini tingkat pembangunannya masih tertinggal, seperti Kabupaten Pegunungan Arfak, Tambrauw, dan Maybrat.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, mengenai tingkat ketimpangan yang diukur dengan Indeks Williamson pada periode pengamatan tahun 2017 hingga 2021, ketimpangan yang terjadi di kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat tergolong cukup tinggi, dan hal ini menunjukkan semakin melebarnya ketimpangan antar daerah tersebut. Secara kuantitatif, rata-rata angka Indeks Williamson untuk PDRB dengan sektor migas adalah sebesar 1,51428, sementara rata-rata Indeks Williamson untuk PDRB tanpa sektor migas adalah sebesar

0,4327. Angka ini mengonfirmasi bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Papua Barat masih menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah.

Kedua, berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen yang dilakukan pada periode 2018 hingga 2021, ditemukan perbedaan klasifikasi yang signifikan antara perhitungan dengan migas dan tanpa migas. Untuk PDRB dengan migas, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Pegunungan Arfak masuk dalam kuadran II, yang merupakan daerah maju tapi tertekan, artinya daerah-daerah tersebut memiliki pendapatan per kapita di atas rata-rata provinsi namun pertumbuhan ekonominya berada di bawah rata-rata. Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Sorong berada pada kuadran III, yaitu daerah berkembang cepat, yang berarti memiliki pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata tetapi pendapatan per kapita di bawah rata-rata. Sementara itu, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kota Sorong berada pada kuadran IV, yaitu daerah relatif tertinggal, dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita keduanya di bawah rata-rata provinsi.

Sementara itu, untuk PDRB tanpa migas, hasil analisis Tipologi Klassen menunjukkan bahwa Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Raja Ampat masuk pada kuadran I, yaitu daerah cepat maju dan cepat tumbuh, karena memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang keduanya di atas rata-rata provinsi. Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kota Sorong masuk pada kuadran III, yaitu daerah maju tapi tertekan. Sedangkan Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Manokwari Selatan masuk pada kuadran IV, yaitu daerah relatif tertinggal. Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan klasifikasi dan perbandingan yang signifikan antara kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat berdasarkan laju pertumbuhan dan PDRB per kapita dengan migas dan tanpa migas menurut pendekatan Tipologi Klassen. Temuan ini menegaskan bahwa sektor migas memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap posisi ekonomi suatu daerah, sehingga kebijakan pembangunan perlu mempertimbangkan secara cermat peran sektor tersebut dalam upaya pemerataan pembangunan antar wilayah di Provinsi Papua Barat.

2. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan, yaitu : (1) Pemerintah Provinsi Papua Barat diharapkan memprioritaskan kebijakan ekonomi pada daerah relatif tertinggal seperti Pegunungan Arfak, Tambrauw, dan Maybrat untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, pemerintah perlu menyebarkan konsentrasi kegiatan ekonomi secara lebih merata agar tidak hanya terpusat di Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Sorong, dan Kota Sorong, sehingga ketimpangan dapat menurun dan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara bersama; (2) Pemerintah juga diharapkan mampu merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat untuk masing-masing kabupaten/kota dengan mengarahkan pengembangan infrastruktur kepada daerah-daerah yang masih tertinggal; Terakhir, (3) bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan melakukan perbandingan antar provinsi serta menambahkan variabel lain seperti belanja pemerintah daerah, tingkat pendidikan, atau angka harapan hidup agar hasil yang diperoleh lebih kaya dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilhaq, F. (2014). Analisis σ dan β convergence pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2002-2012. [Skripsi, Universitas Gadjah Mada].
- Adisasmita, P. (2010). Pengembangan wilayah: Konsep dan teori. Graha Ilmu.
- Ardani. (1992). Analysis of regional growth and disparity: The impact analysis of the project on Indonesian development [Disertasi, University of Pennsylvania].
- Arsyad, L. (2010). Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah. BPFE-Yogyakarta.
- Darda, T. (2021). Analisis ketimpangan pembangunan di Kabupaten Luwu tahun 2011-2019. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 18(2), 176-182.

- Ekwarso, H. (2016). Analisis ketimpangan pembangunan antar wilayah kecamatan di Kota Dumai. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, VII(19), 1-16.
- Emalia, Z. (2009). Analisis konvergensi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita antarkabupaten/kota di Provinsi Lampung [Tesis, Universitas Gadjah Mada].
- Endarwati, U. (2017). Analisis ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 2(1).
- Hadju, I. I. (2021). Analisis ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(1).
- Hartati, Y. S. (2022). Analisis ketimpangan ekonomi di Provinsi Papua. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(2), 19-29.
- Jhingan, M. L. (1995). *Ekonomi pembangunan perencanaan*. Rajawali Pers.
- Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *The American Economic Review*, XLV.
- Maulana, A. (2019). Analisis ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2010-2017. *JIEP*, 19(1), 1412-2200.
- Naibaho, G. O. (2020). Analisis ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Nasional Sintia* 5, 16(3), 369-378.
- Putri, H. P. (2010). Analisis disparitas pendapatan di Kabupaten Kendal tahun 2002-2006 (Studi kasus daerah dataran rendah dan daerah dataran tinggi).
- Ridho, M. (2022). Analisis ketimpangan pembangunan wilayah antar provinsi di Pulau Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 11(1).
- Shaffira, A. F. (2022). Ketimpangan pembangunan di Takalar, Gowa, Maros, Pangkep, dan Makassar [Skripsi, Universitas Hasanuddin].
- Sianturi, Y. S. (2011). Dampak desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah (Studi kasus kabupaten/kota Provinsi Sumatera) [Skripsi, Universitas Diponegoro].
- Simanjuntak, P. (2001). *Pengantar ekonomi sumber daya manusia*. LPFEUI.
- Solow, R. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65-94.
- Sukirno, S. (1994). *Ekonomi pembangunan*. LPEF-UI Bima Grafika.
- Suntari, M. V. (2019). Analisis ketimpangan pembangunan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan (Studi kasus Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Bumbu). *Jurnal Ecoplan*, 2(2), 67-76.
- Suryana. (2000). *Ekonomi pembangunan: Problematika dan pendekatan*. Salemba Empat.
- Tambunan, T. T. H. (2011). *Perekonomian Indonesia: Kajian teoritis dan analisis empiris*. Ghalia Indonesia.
- Tarigan, R. (2005). *Ekonomi regional: Teori dan aplikasi*. Bumi Aksara.
- Tipka, J. (2015). Analisis ketimpangan pembangunan antara kabupaten/kota di Provinsi Maluku. *Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan*, 9(1), 63-71.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2008). *Pembangunan ekonomi (Edisi 1)*. Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic development (11th ed.)*. Pearson.
- Wajdi, F. (2011). *Hukum ekonomi Islam*. Sinar Grafika.
- Wie, T. K. (1981). *Pemerataan, kemiskinan, ketimpangan*. Sinar Harapan.
- Williamson, J. G. (1965). Regional Equality And The Process Of National Development: A Description Pattern. *Economic Development and Cultural Change*, 13(4), 3-45.